

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Profil Daerah Kabupaten Sintang dapat diselesaikan. Buku Profil Daerah Kabupaten Sintang adalah wujud dari pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah yang secara umum menggambarkan seluruh kondisi, Potensi dan berbagai permasalahan yang mencakup aspek fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan ekonomi, pemerintahan kelembagaan, infrastruktur, sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang di masa yang akan datang. Kepada Badan/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun Swasta agar selalu membantu memberikan informasi data yang akurat, tepat waktu serta dapat

dipertanggung jawabkan demi peningkatan kualitas penerbitan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi serta saran dan pendapat kami ucapkan terima kasih. Semoga Buku Profil Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Sintang, Februari 2015

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660214 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Letak Wilayah.....	1
1.2 Luas Wilayah.....	3
1.3 Topografi dan Sungai.....	5
1.4 Keadaan Iklim.....	6
1.5 Pemerintahan.....	8
1.5.1 Sejarah Kabupaten Sintang.....	8
1.5.2 Pegawai Negeri Sipil.....	11
1.5.3 Pemerintah Desa.....	15
BAB II SOSIAL BUDAYA.....	16
2.1 Jumlah Penduduk.....	16
2.2 Ketenagakerjaan.....	19
2.3 Pendidikan.....	19

2.4	Kesehatan.....	26
2.5	Keluarga Berencana.....	30
2.6	Kriminalitas.....	31
2.7	Agama.....	32
2.8	Kesejahteraan Sosial.....	33
BAB III SUMBER DAYA ALAM.....		35
3.1	Pertanian.....	35
3.2	Perkebunan.....	39
3.3	Kehutanan.....	46
3.4	Peternakan.....	47
3.5	Perikanan.....	48
BAB IV INDUSTRI, PERDAGANGAN, KONSTRUKSI, ENERGI DAN AIR BERSIH.....		49
4.1	Industri, Perdagangan dan Konstruksi.....	49
4.2	Energi Listrik.....	51
4.3	Air Bersih.....	52

BAB V TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA..	54
5.1 Panjang Jalan.....	54
5.2 Perhubungan Darat.....	56
5.3 Perhubungan Udara.....	57
5.4 Komunikasi.....	57
5.5 Hotel.....	58
5.6 Pariwisata.....	59
BAB VI EKONOMI DAN KEUANGAN.....	60
6.1 Keuangan Daerah.....	60
6.2 Perbankan.....	63
6.3 Penanaman Modal.....	64
6.4 Lembaga Keuangan Lainnya.....	65
6.5 Harga – harga.....	65
6.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	66
6.7 Struktur Perekonomian.....	69
6.8 PDRB Per Kapita.....	70
6.9 PDRB Menurut Penggunaan.....	71

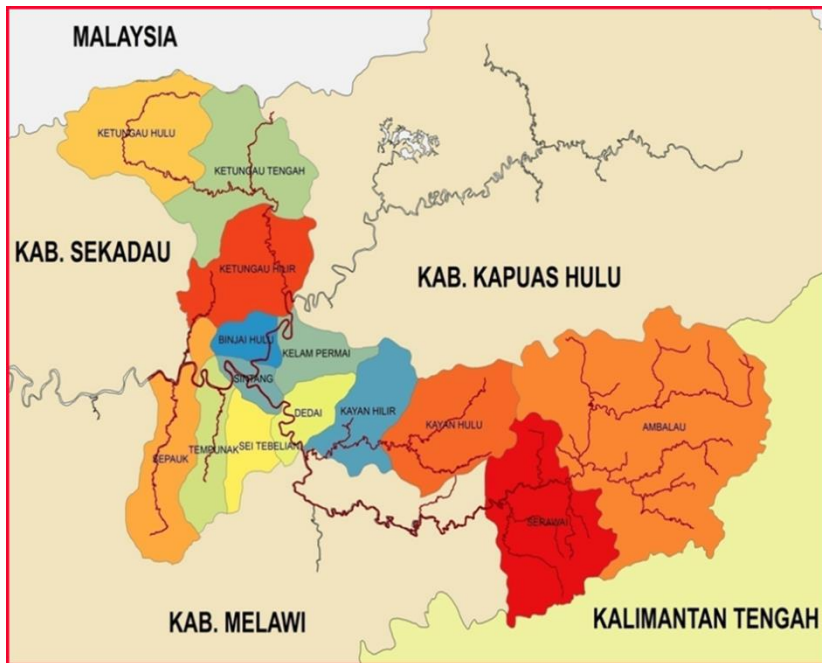
BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Letak Wilayah

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu:

- Utara : Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan: Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Ketapang.
- Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu
- Barat : Kab. Sanggau, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau



1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen. Pada tahun 2014, jumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sintang dimekarkan menjadi 14. Sampai tahun 2014, Kabupaten Sintang terdiri atas 14 kecamatan (perhatikan table pada halaman berikutnya).

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN SINTANG
Total Area of Sintang Regency

No.	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota <i>Capital</i>	Luas Area (Km ²)	Persentase terhadap luas kabupa <i>Percentage to total area of regency</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	S e r a w a i	Nanga Serawai	2 127,50	9,84
2	A m b a l a u	Nanga Kemangai	6386,40	29,52
3	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50	4,33
4	S e p a u k	Nanga Sepauk	1 825,70	8,44
5	Tempunak	Nanga Tempunak	1 027,00	4,75
6	Sungai Tebelian	Sungai Uko	526,50	2,43
7	S i n t a n g	Sintang	277,05	1,28
8	D e d a i	Naga Dedai	694,10	3,21
9	Kayan Hilir	Nabga Mau	1 136,70	5,25
10	Kelam Permai	Kebong	523,80	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	307,65	1,42
12	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1 544,50	7,14
13	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2 182,40	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	2 138,20	9,88
Kabupaten Sintang			21 635,00	100,00

Sumber / Source : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang

1.3 Topografi dan Sungai

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 persen dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di

Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 persen.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut.

Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

1.4 Keadaan Iklim

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sintang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan yaitu sebesar 53,50 persen.

Sepanjang tahun 2012, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 249,42 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2012 terjadi pada bulan Maret, yaitu mencapai 422,6 milimeter dengan hari hujan sebanyak 23 hari, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu mencapai 62,9 milimeter dengan hari hujan sebanyak 8 hari. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

1.5 Pemerintahan

1.5.1 Sejarah Kabupaten Sintang

Daerah Sintang, pada masa pemerintahan Belanda (sekitar tahun 1936) merupakan daerah *landschop* di bawah naungan pemerintahan *Gouvernement*. Daerah *Landschop* ini terbagi menjadi 4 (empat) *onderafdeling* yang dipimpin oleh seorang *controleur* atau *gesagkekber*, yaitu:

1. *Onderafdeling Sintang*, berkedudukan di Sintang.
2. *Onderafdeling Melawi*, berkedudukan di Nanga Pinoh.
3. *Onderafdeling Semitau*, berkedudukan di Semitau.
4. *Onderafdeling Boeven Kapuas*, berkedudukan di Putussibau.

Sedangkan daerah kerajaan Sintang yang didirikan oleh Demang Irawan (Jubair I) dijadikan daerah *swapraja Sintang* dan kerajaan Tanah Pinoh dijadikan *neo swapraja Tanah Pinoh*. Pemerintahan *Landschop* ini berakhir pada tahun 1942 dan kemudian tampuk pemerintahan diambil alih oleh Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, struktur pemerintahan yang berlaku

tidak mengalami perubahan hanya sebutan wilayah kepala pemerintahan yang disesuaikan dengan bahasa negara yang memerintah ketika itu. Kepala negara disebut Kenkarikan (semacam Bupati sekarang) sedangkan wakilnya disebut Bunkenkarikan dan di setiap kecamatan diangkat Gunco (Kepala Daerah).

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia, kekuasaan pemerintahan Belanda yang disebut Afdeling Sintang diganti dengan Kabupaten Sintang, Onderafdeling diganti dengan Kewedanan, Distric diganti dengan Kecamatan. Demikian pula halnya dengan jabatan Residen diganti dengan Bupati, kepala Distric diganti dengan Camat dan yang menjadi Bupati Sintang pada waktu itu adalah Bapak L. Toding.

Untuk merealisasikan pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953, UU No. 25 tahun 1956 dan UU No. 4 tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPR Peralihan, maka pada tanggal 27 Oktober 1956 dilaksanakanlah pelantikan

keanggotaan DPRD Peralihan Kabupaten Sintang. Selanjutnya sesuai Keppres No. 6 tahun 1959 tanggal 6 Nopember 1959, maka azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953 dihimpun kembali dalam satu tangan Bupati Kepala Daerah yang dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selain itu, dengan instruksi Mendagri No. 3 tahun 1966 tanggal 1 Pebruari 1966 jalannya roda pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mulai diarahkan dan disempurnakan.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 tahun 2000 pemerintahan Kabupaten Sintang dibagi menjadi 21 pemerintahan kecamatan kemudian disesuaikan kembali setelah adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang sehingga Kabupaten Sintang saat ini menjadi 14 pemerintahan kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen Kabupaten

Sintang sedangkan luas masing-masing kecamatan hanya berkisar 1-29 persen dari luas Kabupaten Sintang

1.5.2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Pegawai Negeri merupakan unsur utama daripada aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pelaksana dari pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Daerah yang sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan Nasional.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional/Daerah terutama tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara/Daerah dan kesempurnaan Aparatur Negara/Daerah tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Dilihat dari Struktur Organisasi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 13 Dinas, 5 Kantor, 5 Cabang Dinas Pendidikan, 8 Badan serta 20 Pemerintahan Kecamatan dan 4 UPTD yang mencakup RSUD, Puskesmas, LLK 6UKM dan SKB.

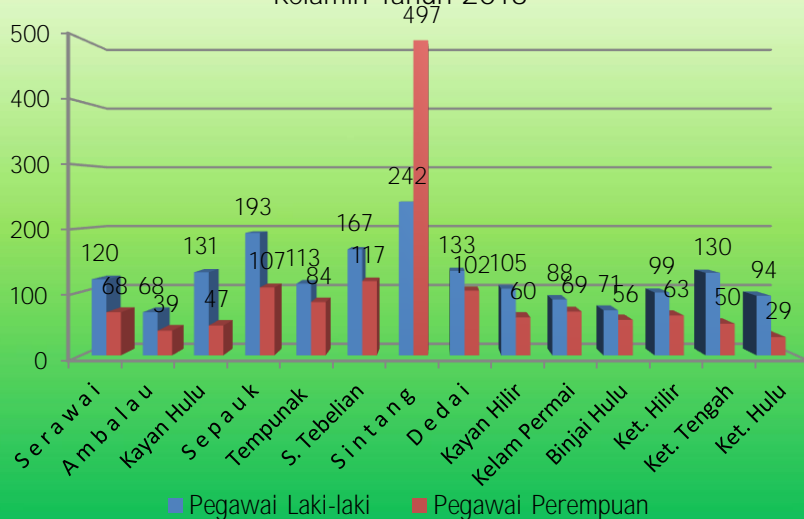
Pada tahun 2005, organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan antara lain membentuk kelembagaan baru yaitu Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Sintang yang sekarang menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) Kabupaten Sintang.

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat (Instansi Vertikal), BUMN serta BUMD yang bekerja di Kabupaten Sintang keadaan 31 Desember 2012 sebanyak 7.910 orang yang terdiri dari 6.129 orang Pegawai Daerah, 1.255 orang Pegawai Pusat dan 526 Pegawai

BUMN/BUMD. Dari 6.129 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, 1,08 persen golongan I; 26,02 persen golongan II; 43,94 persen golongan III; dan 28,96 persen golongan IV. Jika jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dirinci menurut jenis kelamin maka sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 59,46 persen sedangkan pegawai perempuan sebanyak 40,54 persen.

Untuk jumlah PNS Pusat berjumlah 1.255 orang yang terdiri dari golongan I; 0,24 persen, golongan II; 58,49 persen, golongan III; 38,33 persen dan golongan IV sebanyak 2,95 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 83,11 persen dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 16,89 persen. Untuk Pegawai BUMN/BUMD dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 73 persen dan pegawai perempuan sebesar 27 persen. Perhatikan gambar berikut :

Grafik 2. Distribusi Pegawai Daerah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013



1.5.3. Pemerintahan Desa

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 v c j w p " 4 2 2 5 " v c p i i c n " 3 : " F g u g o d g t " 4 2 O g n c y k " f c p " M c d w r c v g p " U g m c f c w " f k " R yang telah masuk ke dalam Kabupaten Melawi, mulai tahun 2005 tidak masuk lagi dalam administrasi Kabupaten Sintang. Secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 391 desa dan 16 kelurahan.

BAB II

SOSIAL BUDAYA

2. 1. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk yang cukup pesat merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, permasalahan yang paling esensial adalah yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja/usaha serta penyediaan bahan pangan. Faktor yang sangat umum yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian dan angka migrasi (migrasi datang dan migrasi masuk). Kejadian ini biasa disebut dengan kejadian vital penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk 2013, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 384.692 dengan rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 945 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi

tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami penurunan, hal ini diakibatkan jumlah desa yang bertambah menjadi 407 desa/kelurahan. Kepadatan penduduk seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2013 tercatat rata-rata 1,66 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2000-2010) yang besarnya rata-rata 1,62 persen per tahun.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 65.939 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,54 persen selama kurun waktu 2010-2013, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 48.917 jiwa dan laju pertumbuhan Penduduk sebesar 1,77 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian

dengan jumlah penduduk 30.364 jiwa serta lpp sebesar 1,38 persen.
Perhatikan gambar berikut :



2. 2. Ketenagakerjaan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2013 tercatat 302.204 jiwa. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja terjadi peningkatan pada jumlah pencari kerja, yaitu dari 515 jiwa pada tahun 2011 menjadi 1.060 jiwa pada tahun 2012.

Dari seluruh tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2012 disalurkan sebanyak 200 orang, ini berarti mengalami peningkatan dengan jumlah yang disalurkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 170 orang. Pencari kerja terbanyak yang terdaftar pada tahun 2012 rata-rata berpendidikan terakhir SMTA dan Sarjana Muda.

2. 3. Pendidikan

Pendidikan di suatu daerah atau suatu negara merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan

dan kemajuan daerah atau negara tersebut. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih mudah menerima dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang dapat berperan dalam meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan proses pendidikan sangat tergantung oleh tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah prasarana SD di Kabupaten Sintang sebanyak 412 sekolah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2012/2013. Dari 412 sekolah tersebut 96,84 persen merupakan SD Negeri dan sisanya 3,16 persen merupakan SD Swasta.

Prasarana SLTP Negeri di tahun ajaran 2013/2014 jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012/2013 yaitu dari 81 sekolah

negeri menjadi 90 sekolah negeri. Tahun ajaran 2013/2014, jumlah murid SD di Kabupaten Sintang mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah guru SD mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran 2012/2013 yaitu sebanyak 89 orang guru. Pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah murid SD mencapai 59.637 orang dan jumlah guru SD yang ada sebanyak 3.176 orang. Hal ini berarti rasio murid terhadap guru mencapai 18,78 yang artinya bahwa setiap guru mempunyai beban mendidik rata-rata sebanyak 19 murid.

Di tingkat SLTP, jumlah murid dan jumlah guru sama-sama mengalami penurunan. Murid SLTP tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 17.591 orang sedangkan jumlah guru yang mengajar pada tahun ajaran 2013/2014 sejumlah 1.009 orang guru, menurun sebanyak 103 orang jika dibandingkan tahun ajaran 2012/2013. Untuk jenjang pendidikan SLTA, jumlah prasarana sekolah pada tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 36 sekolah yang sebelumnya pada tahun ajaran 2012/2013 sejumlah 42 sekolah. Untuk jumlah murid pada tahun ajaran 2013/2014 mengalami penurunan menjadi 7.379 orang murid, sedangkan guru SLTA pada tahun ajaran 2013/2014 tidak

mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran 2012/2013, yaitu sebanyak 307 orang, sehingga rasio murid terhadap guru menjadi sebesar 24,03 yang artinya bahwa setiap guru mempunyai beban mengajar rata-rata sebanyak 25 murid.

Masih seperti tahun sebelumnya, pada tahun ajaran 2013/2014, di Kabupaten Sintang terdapat 6 (enam) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Kapuas, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Akademi Perawat (AKPER), Sekolah Tinggi Theologi Khatulistiwa (STTK), Sekolah Tinggi Agama K u n c o " O c ø c t dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kapuas Raya. Dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sintang pemerintah berkeinginan agar tingkat pendidikan di Kabupaten Sintang bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

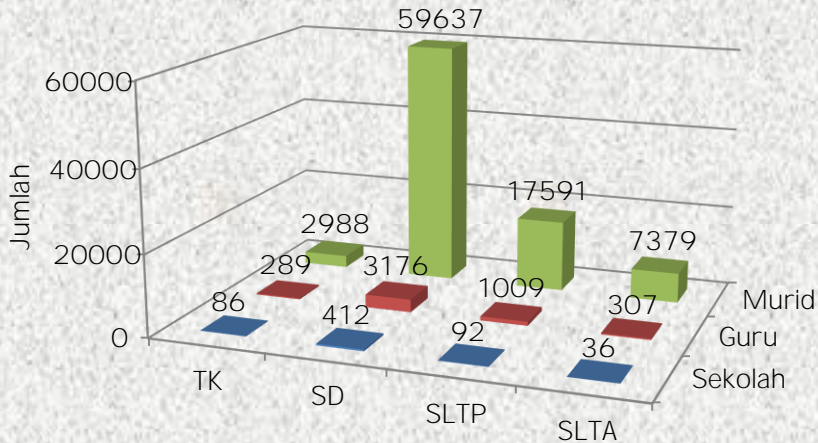
Jumlah mahasiswa menunjukkan bahwa secara umum untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan mahasiswa laki-laki, yaitu secara berturut-turut 55,00 persen dan 45,00 persen.

TABEL 2.1
BANYAKNYA SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2013/2014

No.	Kecamatan <i>District</i>	Tingkat Pendidikan <i>Level of Education</i>									
		T K		S D		SLTP		SLTA		PERGURUAN TINGGI	
		Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Serawai	2	-	-	26	2	4	-	2	-	-
2	Ambalau	-	-	-	28	-	4	-	1	-	-
3	Kayan Hulu	1	-	-	33	-	8	-	1	-	-
4	Sepauk	14	-	2	42	-	11	-	3	-	-
5	Tempunak	13	-	-	27	-	8	-	1	-	-
6	Sei Tebelian	15	-	1	25	-	5	-	2	-	-
7	Sintang	23	2	6	29	-	7	11	4	6	-
8	Dedai	5	-	-	28	-	6	-	2	-	-
9	Kayan Hilir	1	-	-	34	-	8	-	2	-	-

10	Kelam Permai	1	-	1	16	-	6	-	2	-	-
11	Binjai Hulu	6	-	-	11	-	2	-	1	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	2	34	-	7	-	1	-	-
13	Ketungau Tengah	1	-	1	37	-	7	-	2	-	-
14	Ketungau Hulu	2	-	-	29	-	7	-	1	-	-
2013 / 2014		84	2	13	399	2	90	11	25	6	
2012 / 2013		76	2	13	376	17	81	19	23	6	
2011 / 2012		76	2	13	376	19	72	18	23	6	
2010 / 2011		76	2	13	376	19	71	17	22	6	

Grafik 4. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sintang Tahun 2013



2. 4. Kesehatan

Pemerintah selalu memperhatikan dan berupaya meningkatkan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat karena unsur kemanusiaan, hal ini dapat kita ketahui dari adanya pembangunan berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan adanya prasarana kesehatan yang memadai maka diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dapat lebih baik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sebab status kesehatan masyarakat adalah salah satu indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi.

Pembangunan di bidang kesehatan saat ini diarahkan pada penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi bangunan fisik (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Poliklinik) serta pengadaan tenaga kesehatan yang terampil. Pada tahun 2013, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 263 unit yang terdiri dari 3 Rumah Sakit, 14 Balai Pengobatan, 20 Puskesmas (6 Puskesmas dengan rawat inap dan 14

tanpa rawat inap), 107 Polindes dan 119 Poskesdes. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 secara total keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,95 persen. Jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Sintang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 10,94 persen dibandingkan tahun 2012. Secara persentase, penurunan terbesar terjadi pada penurunan jumlah teknisi medis dan farmasi yaitu pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 45 orang dan 78 orang menurun menjadi 34 orang dan 49 orang pada tahun 2013 atau terjadi penurunanan jumlah tenaga kesehatan masing masing sebesar 24,44 persen dan 26,92 persen.

TABEL 2.2
BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2013

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Balai Pengobat	Puskesmas	Polindes	Poskesdes
1	Serawai	-	-	1	9	8
2	Ambalau	-	-	1	6	5
3	Kayan Hulu	-	-	1	11	11
4	Sepauk	-	-	1	12	10
5	Tempunak	-	-	2	10	9
6	Sei Tebelian	-	-	1	10	9
7	Sintang	3	14	3	10	4
8	Dedai	-	-	2	10	11
9	Kayan Hilir	-	-	1	6	11
10	Kelam Permai	-	-	2	5	9

11	Binjai Hulu	-	-	1	4	5
12	Ketungau Hilir	-	-	2	5	8
13	Ketungau Tengah	-	-	1	7	10
14	Ketungau Hulu	-	-	1	2	9
2013		3	14	20	107	119
2012		3	14	20	107	119
2011		2	14	20	107	110
2010		2	14	20	105	105
2009		2	9	20	105	103

Sumber/Source Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

*) Puskesmas yang dimaksud tidak termasuk puskesmas pembantu dan keliling

2. 5. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Nasional (KBN) merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk atau masyarakat, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang di-laksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal. Dengan ditunjang ketersediaan data mikro dan basis data keluarga serta individu anggota keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga. Sehingga hasil-hasil pelaksanaan program KBN dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan serta untuk kepentingan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkat wilayah.

Di Kabupaten Sintang pada tahun 2013 peserta KB baru tercatat sebanyak 11.000 pasangan atau 119,38 persen dibandingkan dengan target sebanyak 9.214 pasangan, sementara peserta KB aktif tercatat sebanyak

57.692 pasangan atau 78,86 persen dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 73.156 pasangan.

Jika dilihat dari segi pemilihan alat kontrasepsi, yang paling digemari oleh klien (akseptor) tercatat sebagai pilihan terbanyak adalah suntikan yaitu sebanyak 26.104 (45,25 persen) dibandingkan dengan jumlah peserta akseptor pil 24.292 (42,11 persen), Implant dan Impanon 3.435 (5,95 persen), IUD 2.458 (4,26 persen), Kondom 758 (1,31 persen), medis operasi wanita 498 (0,86 persen) dan medis operasi pria (vasektomi) 147 (0,26 persen). Dari jumlah Peserta Akseptor 57.692 pasangan tersebut peran pria ber-KB (vasektomi dan kondom) sebesar 1,57 persen.

2. 6. Kriminalitas

Sebagai indikator keamanan, maka statistik kriminal perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan

merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sintang, seperti laporan Polres Sintang pada tahun 2013 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 148 kasus dan diikuti oleh kasus penggelapan, pengañaian, dan curanmor yang masing-masing sebanyak 55, 52, dan 47 kasus. Sedangkan untuk kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2013 secara umum tercatat paling banyak adalah surat, yaitu sebanyak 1.178 kasus diikuti oleh syarat perlengkapan sebanyak 802 kasus. Hal ini jauh mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012 yaitu masing-masing 1.955 dan 1.398 kasus.

2. 7. Agama

Negara Indonesia yang ber-dasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamian kehidupan umat beragama dan senantiasa mengembangkan ke-

rukunan hidup antara pemeluk agama dan kepercayaan guna membina kehidupan masyarakat dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Untuk menunjang kegiatan umat beragama di masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi semua umat guna untuk meningkatkan pelayanan bagi kepentingan pelaksanaan ibadah keagamaan, yaitu yang mencakup prasarana ibadah serta pelayanan kepada masyarakat.

2. 8. Kesejahteraan Sosial

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mengupayakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat ke-sejahteraan sosial masyarakat akan meningkat lebih baik. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan pada fakir miskin, masyarakat terasing, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan panti asuhan.

Menurut catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 28 penyandang cacat tubuh, 665 cacat mental dan 180 cacat ganda. Kalau dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penyandang cacat tubuh jauh mengalami penurunan yaitu sebesar 98,15 persen, dari 1.511 orang menjadi hanya 28 orang.

BAB III

SUMBER DAYA ALAM

3. 1. Pertanian

Struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Walaupun demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, banyak juga sebagai penyedia bahan baku untuk keperluan industri.

Produksi sektor pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan perlu terus dipacu dengan tujuan untuk memantapkan swasem-bada pangan dan penganekaragaman jenis bahan makanan. Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh sebab itu padi merupakan

komoditi strategis dalam konteks pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian. Pada tahun 2013 produksi padi di Kabupaten Sintang. Sebesar 93.682 ton dengan luas panen sebesar 35.096 Ha dan rata-rata produksi sebesar 26,69 kuintal/Ha. Produksi padi terbesar yaitu padi sawah sebesar 59.140 ton dengan luas panen sebesar 16.780 Ha dan rata-rata produksi sebesar 35,24 kuintal/Ha. Sedangkan sisanya adalah padi ladang dengan produksi sebesar 34.542 ton dengan luas panen sebesar 18.316 Ha dan rata-rata produksi sebesar 18,86 kuintal/Ha.

Kalau dibandingkan tahun 2013 dan tahun 2012 produksi padi Kabupaten sintang mengalami peningkatan sebesar 9,80 persen, ini disebabkan adanya peningkatan luas panen padi dari 29.824 Ha menjadi 35.096 Ha atau terjadi peningkatan sebesar 17,68 persen. Untuk tanaman palawija tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang mengalami peningkatan produksi adalah ubi kayu sebesar 1,18 persen, ubi jalar sebesar 31,26 persen dan kacang tanah sebesar 46,27. Sedangkan yang mengalami penurunan,

yaitu jagung sebesar 13,44 persen, kedelai sebesar 38,17 persen dan kacang hijau sebesar 72,73 persen.

TABEL 3.1
LUAS PANEN, RATA-RATA PRODUKSI DAN PRODUKSI PADI
(SAWAH+LADANG) TAHUN 2013

No.	Kecamatan District	Luas Panen <i>Harvested Area</i> (Ha)	Ratarata Produk <i>Yield Rate</i> (Kuintal / Ha)	Produksi <i>Production</i> (Ton)
[1]		[3]	[4]	[5]
1	S e r a w a i	2 291	21,58	4 941
2	A m b a l a u	2 241	21,24	4 761
3	Kayan Hulu	1 822	26,59	4 841
4	S e p a u k	5 996	26,78	16 051
5	Tempunak	3 928	30,77	12 081
6	Sei Tebelian	1 806	33,91	6 124

7	Sintang	567	28,87	1 637
8	De dai	2 288	25,60	5 851
9	Kayan Hilir	2 183	29,93	6 530
10	Kelam Permai	3 111	30,11	9 360
11	Binjai Hulu	1 833	30,75	5 630
12	Ketungau Hilir	1 193	27,20	3 240
13	Ketungau Tengah	3 839	20,13	7 728
14	Ketungau Hulu	1 998	24,34	4 860
2 0 1 3		35 09	26,69	93 68
2 0 1 2		29 82	28,61	85 31
2 0 1 1		36 56	25,83	94 44
2 0 1 0		33 08	27,45	90 82

Sumber *Source* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

3. 2. Perkebunan

Hasil perkebunan yang di-utamakan untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya. Pada tahun 2013 produksi tanaman karet mengalami penurunan sebesar 1,10 persen yaitu dari 37.867,75 ton menjadi 37.449,50 ton. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim dimana terjadi kemarau yang panjang ditahun 2013. Untuk tanaman perkebunan kelapa sawit masih tetap menjadi andalan Kabupaten Sintang dimana di tahun 2013 produksinya mencapai 739.119,92 ton, dengan luas area tanaman menghasilkan 51.734,21 Ha dan tanaman belum menghasilkan 66.414,68 Ha. Perhatikan gambar berikut :

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
MENURUT JENISNYA TAHUN 2009 -2013 (TON)

Jenis Tanaman	2009	2010	2011	2012	2013
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
K a r e t	34 600,7	34 719,6	35 101,3	37 867,7	37 449,5
Kelapa Dalam	144,64	147,28	149,05	150,33	149,80
Kelapa Hibrida	235,74	234,41	234,41	234,41	234,30
Kelapa Sawit	503 355,1	511 189,2	527 031,7	594 614,1	739 119,9
L a d a	646,70	677,31	707,14	756,21	505,70
K o p i	93,32	97,63	101,29	101,28	97,00
Kakao	5,20	4,75	5,29	7,79	9,00
Aneka Tanaman	40,39	42,26	44,50	46,82	57,44
Jumlah <i>Total</i>					

Sumber *Source* Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

TABEL 3.3
LUAS TANAMAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN KARET
MENURUT POLA PENGEMBANGAN
2012*

No.	Pola Pengembangan <i>Development Design</i>	Petani <i>Farmer</i> (KK)	Luas Tanama <i>Planted Area</i> (Ha)	Produksi <i>Production</i> (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	<u>Pola PIR</u>			
	a. Kebun Inti	-	1 352,0	298,4
	b. Kebun Plasma	2 674	5 434,5	5 389,3
2	<u>Pola PBS (Lama dan B)</u>			
	a. Kebun Inti	-	2 993,0	-
	b. Kebun Plasma	-	-	-
3	<u>Pola UPP</u>	2 441	2 443,0	2 463,5

4	Pola Swadaya (Rakyat			
	a. Berbantuan	18 43	28 034,0	4 458,4
	b. Murni	20 24	43 697,5	25 257,9
	2 0 1 2	43 79	84 930,0	37 867,7
	2 0 1 1	41 97	84 150,0	35 101,3
	2 0 1 0	39 99	80 035,0	34600,7
	2 0 0 9	39 99	76 356,0	31 822,5
	2 0 0 8	39 61	69 281,0	29 428,0

Sumber *Source* Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

*) Data Tahun 2013 Belum Tersedia

TABEL 3.4
LUAS TANAMAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT MENURUT POLA PENGEMBANGAN
TAHUN 2012 *

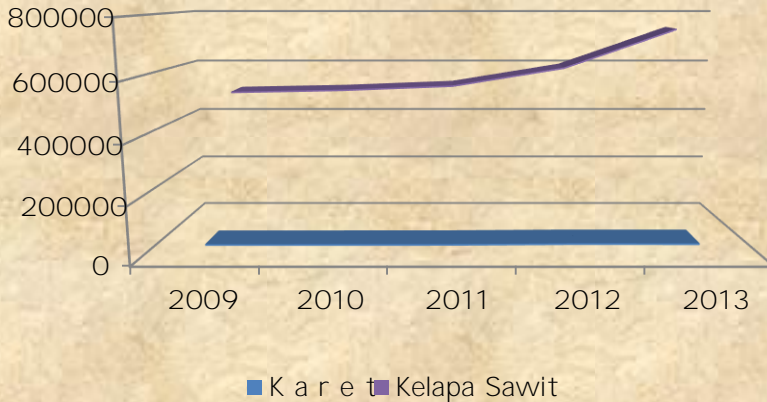
No.	Pola Pengembangar <i>Development Design</i>	Petani <i>Farmer</i> (KK)	Luas Tanama <i>Planted Area</i> (Ha)	Produksi (TBS <i>Production</i> (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	<u>Pola PIR</u>			
	a. Kebun Inti	-	-	-
	b. Kebun Plasma	11 288	28 929,3	178 384,1
2	<u>Pola PBS (Lama dan Baru)</u>			
	a. Kebun Inti	-	72 324,4	416 229,9
	b. Kebun Plasma	-	-	-

3	Pola UPP	-	-	-
4	Pola Swadaya (Rakyat)			
	a. Berbantuan	-	-	-
	b. Murni	-	-	-
2 0 1 2		11	28	
2 0 1 1		11	28	
2 0 1 0		11	28	
2 0 0 9		11	28	

Sumber ~~Source~~ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

*) Data Tahun 2013 Belum Tersedia

Grafik 5. Perkembangan Produksi Karet dan Sawit di Kabupaten Sintang Tahun 2013



3. 3. Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.

Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan SK Menhut No: 259/KPTS-11/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yaitu Taman Nasional 68.603 Ha, Hutan Lindung 446.799 Ha, Hutan Produksi Terbatas 623.505 Ha, Hutan Produksi Biasa 188.465 Ha dan Hutan Wisata 1.334 Ha. Dari area yang ada di Kabupaten Sintang pemanfaatan terbesar yaitu untuk pertanian lahan kering dan area penggunaan lain yaitu 38,59 persen, Taman Nasional 3,17 persen, Hutan Lindung 20,65 persen, Hutan Produksi Terbatas 28,82 persen, Hutan Produksi Biasa 8,71 persen, dan Hutan Wisata 0,06 persen.

3. 4. Peternakan

Populasi ternak dibedakan menurut jenis ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak terbesar pada tahun 2013 yaitu babi berjumlah 69.917 ekor, setelah itu sapi berjumlah 8.170 ekor. Untuk ternak besar selain babi dan sapi ada kambing yang populasinya 2.824 ekor dan kerbau, yang populasinya 236 ekor. Sedangkan unggas terdiri dari ayam dan itik. Ternak ayam terdiri dari ayam ras dan ayam buras masing-masing populasinya sebesar 232.900 ekor dan 441.111 ekor, sedangkan itik populasinya sebesar 17.361 ekor.

Untuk ternak besar dan kecil yang dipotong pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 ada yang mengalami peningkatan yaitu ternak kerbau, sedangkan ternak sapi, babi dan kambing mengalami penurunan. Untuk pemotongan unggas yaitu ayam ras, ayam buras dan itik pemotongannya semua mengalami penurunan.

3. 5. Perikanan

Pada tahun 2013 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen, di mana produksi yang berasal dari perairan umum mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04 persen, sedangkan dari budidaya kolam dan keramba terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,83 persen. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan mas yang terdapat di keramba dengan jumlah produksi sebesar 133,60 ton.

BAB IV

INDUSTRI, PERDAGANGAN, KONSTRUKSI, ENERGI DAN AIR BERSIH

4.1. Industri, Perdagangan dan Konstruksi

Sektor industri dibedakan atas industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Penggolongan ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdapat di perusahaan yang bersangkutan.

- ! Industri besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- ! Industri sedang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.
- ! Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai 19 orang.
- ! Industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Berdasarkan jenis usahanya, industri kecil dibagi menjadi usaha Formal dan Non Formal. Pada tahun 2013 di Kabupaten Sintang terdapat 3.743 perusahaan industri terdiri dari 252 perusahaan usaha formal dengan 738 tenaga kerja dan 3.491 usaha non formal dengan 3.491 tenaga kerja. Jasa perusahaan konstruksi yang beroperasi di Kabupaten Sintang telah mampu menampung tenaga kerja, di samping itu hasilnya pun telah dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, antara lain pembangunan gedung, pembangunan dan perbaikan sarana jalan, jembatan terminal dan sebagainya.

Pada tahun 2013 perusahaan konstruksi yang terdaftar di Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) yaitu sebanyak 110 Perusahaan yang terdiri dari Grade 2 ada 58 Perusahaan, Grade 3 ada 29 Perusahaan, Grade 4 ada 13 Perusahaan, Grade 5 ada 7 Perusahaan dan Grade 6 ada 3 Perusahaan. Untuk Grade 7 tidak ada Perusahaan yang terdaftar di Gapensi.

4.2. Energi Listrik

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha tersebut tampak lebih nyata setelah adanya program pembangunan listrik masuk desa.

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting Sintang sejak tahun 2006, lokasi pembangkit yang masuk PLN ranting Sintang terdapat 13 lokasi pembangkit, sedangkan listrik desa Serawai, listrik desa Tontang dan listrik desa Nanga Kemangai sudah masuk PLN ranting Pinoh Kabupaten Melawi.

Pada tahun 2013, tenaga listrik yang terjual sebanyak 92.151.594 Kwh dan tenaga listrik yang dibangkitkan sebesar 107.967.749 Kwh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 92.352.991 Kwh atau meningkat 16,91 persen.

Sampai dengan tahun 2013 jumlah pelanggan listrik PLN mencapai 27.578 pelanggan, dengan jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga yaitu sebesar 24.121 pelanggan atau sebesar 87,46 persen dari total pelanggan. Sementara itu, golongan Industri& Usaha sebesar 2.345 pelanggan atau sebesar 8,50 persen. Sisanya golongan Pemerintah dan Badan Sosial hanya sebesar 4,03 persen.

4.3. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak / minum maupun mencuci / mandi. Bagi daerah Kabupaten Sintang, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM.

Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terus berupaya meningkatkan peranannya. Pada tahun 2013, banyaknya air minum yang terjual sebesar 1.073.754 m³ dengan nilai penjualan sebesar Rp. 3.496.071.863,00.

Sebagian besar pelanggannya adalah rumah tangga yaitu sebesar 3.348 pelanggan atau sebesar 80,83 persen. Kemudian niaga kecil sebanyak 312 pelanggan atau sebesar 7,53 persen, kantor pemerintah sebanyak 110 pelanggan atau sebesar 2,66 persen, dan sisanya adalah niaga besar, sosial dan industri hanya sebesar 102 pelanggan atau sebesar 2,46 persen dari total pelanggan PDAM seluruhnya.

BAB V

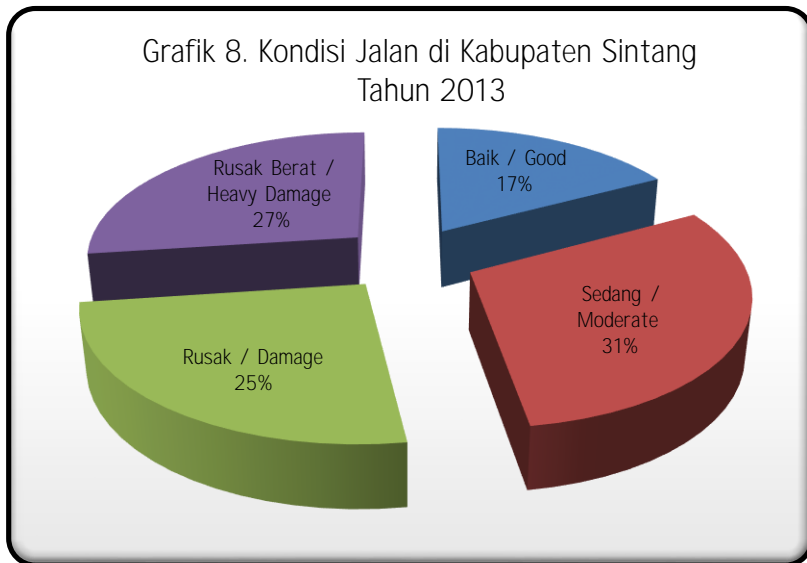
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA

5.1. Panjang Jalan

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Jalan merupakan prasarana angkutan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada tahun 2013 panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 4.508,01 kilometer, di mana permukaan jalan 15,88 persen jalan beraspal, 3,33 persen jalan kerikil, 90,47 persen jalan tanah dan 0,32 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 17,21 persen baik, 30,42 persen

sedang, 25,27 persen rusak dan 27,10 persen rusak berat. Perhatikan gambar berikut :



5.2. Perhubungan Darat

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

Pada akhir tahun 2013, jumlah penambahan kendaraan bermotor yang tercatat pada Polres Sintang sebanyak 13.946 unit dengan jumlah terbesar sepeda motor sebanyak 13.285 atau 95,26 persen. Hal ini cukup beralasan mengingat masih kurangnya sarana transportasi umum, di samping itu juga sepeda motor banyak digunakan oleh sebagian warga untuk berbagai keperluan.

5.3. Perhubungan Udara

Jumlah pesawat dan penumpang angkutan udara pada tahun 2013 baik yang berangkat maupun yang datang melalui Bandar Udara Susilo Sintang mengalami Peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan adanya trayek angkutan penumpang komersil dari Sintang ke Pontianak dan ke Kabupaten Lainnya..

5.4. Komunikasi

Pos sebagai penunjang kegiatan dari sub sektor komunikasi juga perlu diperhatikan perkembangannya. Pada tahun 2013 pengiriman pos melalui PT. Pos Kabupaten Sintang yang berupa surat tercatat, surat kilat khusus, paket pos dan wesel pos mengalami peningkatan.

Nilai pengiriman pos yang terbesar adalah benda pos sebesar 4.200.000 milyar rupiah, kemudian bea wesel pos sebesar 536.juta rupiah,

surat kilat khusus sebesar 405.546 juta rupiah dan paket pos sebesar 234.069 juta rupiah.

5.5. Hotel

Berdasarkan data dari 10 hotel yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Sintang, persentase tingkat penghunian kamar/pemakaian kamar malam selama tahun 2013 rata-rata 47,91 persen dan pemakaian tempat tidur malam rata-rata 69,83 persen. di mana jumlah malam kamar terpakai sebanyak 47.434 kamar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan penggunaan kamar, sebesar 1,67 persen. Tamu yang datang seluruhnya tamu domestik sebanyak 53.890 orang dalam satu tahun. Untuk itu, kegiatan promosi wisata di Kabupaten Sintang harus lebih ditingkatkan di masa yang akan datang guna lebih meningkatkan kunjungan tamu baik tamu asing maupun domestik.

5.6. Pariwisata

Keberadaan sub sektor pariwisata dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama sekali dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu, tersedianya hotel/ akomodasi yang cukup memadai akan dapat menunjang kegiatan sub sektor ini.

BAB VI

EKONOMI DAN KEUANGAN

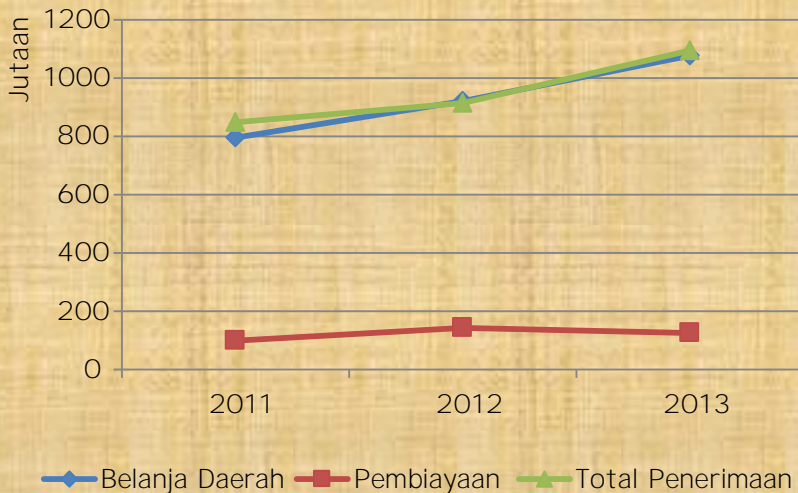
6.1. Keuangan Daerah

Pada tahun 2013 total realisasi penerimaan daerah Kabupaten Sintang sebesar Rp. 1.093.482 trilyun, sedangkan total realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 920.004 milyar yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung 50,75 persen, Belanja Langsung 49,25 persen. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, realisasi penerimaan daerah mengalami peningkatan sebesar 19,64 persen, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar diperoleh dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU dan DAK) sebesar 84,59 persen, kemudian dari Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari

Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi) sebesar 9,25 persen dan sisanya sekitar 6,16 persen adalah dari Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah). Perhatikan gambar berikut :

Grafik 9. Pergerakan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2013



6.2. Perbankan

Posisi kredit yang diberikan menurut jenis penggunaannya berdasarkan lokasi kantor di Kabupaten Sintang keadaan Desember 2013 sebesar Rp 1.978.920 juta, sedangkan posisi kredit yang diberikan menurut jenis penggunaannya berdasarkan lokasi proyek di Kabupaten Sintang keadaan Desember 2013 sebesar Rp 1.978.792 juta. Posisi kredit menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi kantor maupun lokasi Proyek di Kabupaten Sintang keadaan Desember 2013 berada di sektor Perdagangan, hotel dan restoran, kemudian disusul sektor pertanian.

Pada tahun 2013, di Kabupaten Sintang terdapat 42 kantor Bank Umum. Berdasarkan klasifikasi kantor terdapat 8 kantor cabang, 25 kantor cabang pembantu dan 9 Kantor Kas. Sedangkan menurut status kantor terdapat 16 BUMN, 8 BUMD dan 14 BUSN serta 4 BPR.

6.3. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal (investasi) adalah kegiatan sentral dalam perekonomian, karena PMDN dan PMA dapat mempengaruhi produksi nasional maupun regional. Dengan penanaman modal diharapkan juga terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan GNP dan PDRB maupun struktur angkatan kerja.

Pada tahun 2013, rencana dan realisasi proyek PMDN di Kabupaten Sintang berada di sektor Perkebunan, Kehutanan dan sektor Pertambangan, dibandingkan tahun 2012 rencana proyek PMDN mengalami peningkatan, untuk realisasi Proyek PMDN maupun nilai investasi juga berada di sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mengalami peningkatan. Sedangkan rencana Proyek PMA di Kabupaten Sintang berada di sektor perkebunan, Kehutanan dan sektor pertambangan, di mana jumlah proyek mengalami penurunan tetapi nilai investasi mengalami peningkatan, untuk

realisasi jumlah proyek maupun nilai investasi proyek PMA dan tenaga kerja mengalami peningkatan.

6.4. Lembaga Keuangan Lainnya

Selain Bank, Lembaga Keuangan lain yang sangat berperan dalam masyarakat terutama golongan masyarakat ekonomi lemah adalah Perum Pegadaian. Pada Tahun 2013 nasabah di Perum Pegadaian Cabang Sintang sebanyak 11.843, Nilai pinjaman yang disalurkan Perum Pegadaian Sintang sepanjang tahun 2013 mengalami peningkatan, sebesar 91,70 milyar rupiah, sedangkan kredit yang dilunasi mencapai 86,26 milyar rupiah.

6.5. Harga óharga

Perkembangan harga di Kabupaten Sintang pada tahun 2013 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup berarti seiring dengan

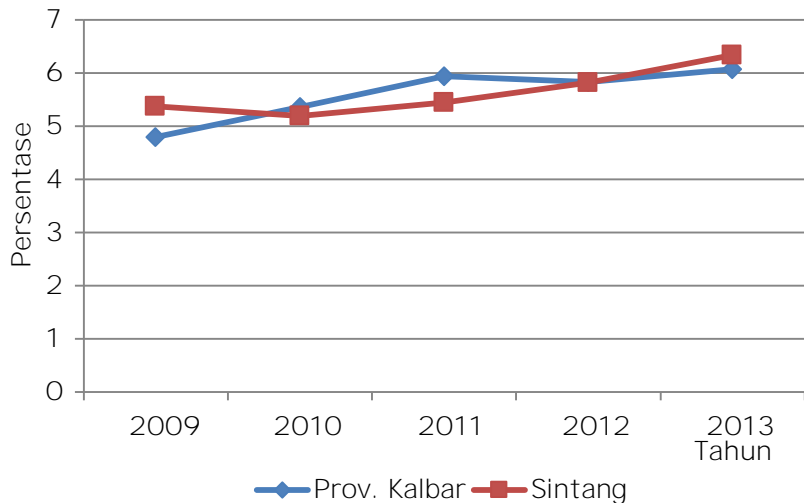
kondisi perekonomian saat ini, terutama bahan bangunan. Selain harga bahan bangunan tersebut, harga makanan juga mengalami kenaikan.

6.6. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Memasuki tahun 2013, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 5,65 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 13,74 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat menjadi 2,48 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,82 persen. Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perhatikan gambar berikut :

Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi



6.7. Struktur Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri.

Pada tahun 2013, ketiga sektor tersebut peranannya mencapai 70,63 persen. Walaupun gabungan peranan ketiga sektor tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2012, namun peranan ketiga sektor tersebut tetap merupakan sektor pemimpin (*leading sector*) bagi pembentukan PDRB Kabupaten Sintang. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 33,85 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,13 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 9,65 persen.

Sektor yang paling kecil sumbangannya yaitu sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,33 persen.

6.8. PDRB Per Kapita

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2013 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 14.688.046 yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp. 14.688.046 atau sebesar Rp. 1.224.003 per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp. 1.565.842 atau 11,93 persen.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus di-tingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan

penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

6.9. PDRB Menurut Penggunaan

Komponen PDRB menurut penggunaan meliputi konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, serta ekspor dan impor. Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan yang tertinggi adalah ekspor-impor barang dan jasa sebesar 11,60 persen, kemudian konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan sebesar 7,41 persen, disusul oleh konsumsi rumah tangga sebesar 6,32 persen.

Pada tahun 2013, komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Konsumsi rumahtangga memberikan kontribusi sebesar 61,45 persen, disusul PMTB sebesar 20,66 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 10,81 persen.